

**PENGARUH DARI PENERAPAN SISTEM MODERNISASI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KAITANNYA DENGAN
TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH

MARIANUS ALEN

NIM : 2018110007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022

RINGKASAN

PENGARUH DARI PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK

Marianus Alen¹, Poppy Indrihastuti², Yayuk Sulistyowati³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang 2022

Email : riannoallen@gmail.com

Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaan modernisasi penataan organisasi penilai dan kaitannya dengan tingkat konsistensi masyarakat dalam melakukan pembebanan biaya. Jenis pemeriksaan ini adalah eksplorasi kuantitatif yang dipimpin dengan teknik tinjauan, khususnya eksplorasi yang mengambil contoh dari suatu populasi dan menggunakan survei sebagai alat pengumpulan informasi penting. Tinjauan ini berarti menguji spekulasi sebagai hubungan atau dampak antar faktor. Teknik pengumpulan informasi merupakan suatu karya yang dapat direpresentasikan untuk memperoleh informasi yang substansial sebagai bahan untuk mengatasi dan mengkaji suatu masalah. Pakar melibatkan teknik tinjauan umum dalam tinjauan ini, khususnya dengan mengedarkan ikhtisar pertanyaan yang baru-baru ini dikumpulkan dicatat sebagai hard copy, terorganisir dan metodis, kemudian disampaikan secara tidak jelas ke area pemeriksaan untuk diajukan, diselesaikan dan dijawab oleh responden terakhir diberikan kembali kepada ilmuwan. Dalam perkiraan ulasan ini, sebuah polling diajukan dimana responden diminta untuk menjawab sesuai penilaian dari responden. Semua instrumen menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5 skor. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan pengujian proporsi untuk menentukan pengaruh faktor bebas terhadap variabel terikat. Sebelum menguji spekulasi, terlebih dahulu uji investigasi kualitas informasi dengan uji legitimasi dan ketergantungan, kemudian uji praduga tradisional. .

Kata Kunci: Sistem Modernisasi Administrasi, Pengetahuan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Retribusi merupakan sumber pendapatan negara yang vital dan kemungkinan besar (Suhendri, dkk, 2021). Untuk mencapai tujuan penerimaan negara dari daerah pemungutan pajak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh, serta pelaksanaan sebagai pendekatan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak membuat langkah-langkah terkait dengan perubahan tugas yang dapat dipertahankan yang mencakup beberapa bidang, termasuk modernisasi administrasi dan organisasi, pengawasan warga, kontrol interior, SDM, modernisasi kerangka data dan berbagai inovasi (Direktorat Jenderal Pajak, laporan tahunan 2007).

Perubahan biaya dilakukan secara bertahap, tahap utama diselesaikan antara 2002-2009. Selama periode ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan dua penyempurnaan penting. Yang pertama adalah perubahan peraturan yang menggabungkan pembangunan kembali otoritatif, peningkatan proses bisnis, dan peningkatan aset manusia dari kerangka kerja eksekutif. Sementara itu, perubahan pengaturan selanjutnya diselesaikan, tepatnya dengan mengubah beberapa peraturan bea dan selanjutnya memberikan peningkatan keuangan. Perubahan tugas periode kedua selesai antara 2009-2012. Pada tahap ini DJP melakukan perubahan terhadap kemajuan SDM dan pemanfaatan inovasi data dalam organisasi penanggung jawab. Para pelaksana SDM merupakan perubahan yang signifikan dan belum pernah selesai pada perubahan-perubahan sebelumnya (Madewing, Irmayanti 2013:16).

Sejauh mana kemajuan yang dibuat dalam perubahan biaya dipandang sebagai pekerjaan untuk membuat DJP lain. DJP menjalankan organisasi tanggung jawab masa kini, adalah administrasi yang terletak pada warga, dan memiliki kualitas hierarki baru yang solid. Gagasan modernisasi organisasi tugas pada tataran fundamental merupakan penyesuaian kerangka organisasi pengeluaran yang dapat berdampak signifikan terhadap pandangan dan perilaku organisasi serta kualitas hierarkis sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat berubah. menjadi pendirian ahli dengan gambaran yang layak secara lokal. Dengan cara ini, sesuai dengan tujuan modernisasi, khususnya untuk meningkatkan konsistensi warga negara, meningkatkan kepastian publik, dan meningkatkan efisiensi dan kejujuran otoritas biaya.

Dengan cara ini, program perubahan organisasi pengeluaran harus direncanakan dan dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh. Kemajuan yang dibuat mencakup bidang-bidang berikut: konstruksi resmi, siklus bisnis dan inovasi data dan korespondensi, dan peningkatan

sumber daya manusia para eksekutif. (Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan 2007: 14) Berdasarkan landasan permasalahan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah dampak modernisasi kerangka organisasi tugas terhadap konsistensi terbuka dalam membayar warga negara.

Permintaan akan meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesadaran dan konsistensi warga serta peningkatan dan perubahan penting di semua bagian pengumpulan pajak ke dalam pelaksanaan perubahan bea. Perubahan tarif di Indonesia dimulai dengan perubahan kunci dalam pengaturan peraturan dan pedoman tugas. Pemulihan kerangka ini adalah kerangka pemilahan biaya yang baru-baru ini dilakukan oleh Sistem Penilaian Resmi telah diubah menjadi Sistem Penilaian Mandiri. Perubahan sejauh biaya pemungutan pajak pada administrasi biaya berkembang lebih lanjut, untuk mendukung konsistensi warga yang pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak. Terlebih lagi, organisasi penilai berusaha membenahi baik dari segi strategi, metode kerja, kedisiplinan dan sikap.

Mengingat gagasan pendapatan penilaian, jika kantor memiliki keinginan untuk meningkatkan pendapatan pengeluarannya, organisasi tugas harus menjawab perkembangan yang terjadi, karena ketidakmampuan untuk menjawab perubahan berarti merusak pintu terbuka atau dalam hal apa pun. acara, membuat masalah. Perubahan di sini adalah cara untuk mencapai modernisasi. Tujuan modernisasi mencakup perluasan konsistensi biaya, kepercayaan pada organisasi yang bertanggung jawab, dan menghasilkan efisiensi tinggi perwakilan biaya. Ide modernisasi penilaian adalah bantuan dan manajemen yang luar biasa dengan pelaksanaan administrasi yang baik. Kunci utama dalam modernisasi adalah penyesuaian pandangan dunia pemungutan pajak. Konsistensi warga dapat dibedakan dari konsistensi warga dalam mendaftar, konsistensi dalam menyimpan surat pemberitahuan, konsistensi dalam menghitung dan membayar hutang yang telah jatuh tempo.

Pada tataran fundamental, perubahan yang terjadi dalam kerangka organisasi pengeluaran yang secara bermakna dapat mempengaruhi cara pandang dan pelaksanaan tugas otoritas serta kualitas hierarkis rencana menyebabkan DJP menjadi lembaga ahli dengan gambaran yang layak secara lokal adalah gagasan modernisasi organisasi muatan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu tempat kerja tugas tingkat lanjut sejak mulai menjalankan strategi kerja standar dan kerangka kerja inovasi yang selama ini menggunakan kerangka kerja elektronik (e-framework). Hal ini dikarenakan wilayah Kota Malang yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian, dinas jagawana, dan visioner bisnis. Alasan di balik mengangkat judul eksplorasi ini adalah karena di kota Malang yang sebagian besar penduduknya visioner bisnis,

peternak, dll, belum ada informasi atau pengetahuan tentang inovasi data dalam pemungutan pajak. sebagai kerangka kerja lokal. Jadi ini hampir bisa pameran DJP, jadi fokus pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sangat penting. Pasalnya, pengamat jeli melihat warga UMKM, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Sebagai aturan umum, UMKM dalam ekonomi masyarakat berperan sebagai penghibur utama dalam latihan keuangan; pemasok bisnis; pemain penting dalam ekonomi terdekat dan penguatan wilayah lokal. Motivasi di balik PDB adalah untuk meringkas tindakan keuangan mengenai ukuran uang tunai tertentu selama jangka waktu tertentu. Komitmen mutlak UMKM terhadap PDB Nasional adalah terhimpunnya seluruh bidang keuangan.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan landasan di atas, maka rencana masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah modernisasi pengaturan ketetapan pajak mempengaruhi konsistensi orang pribadi dalam melakukan penagihan?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Menguji dampak kerangka modernisasi manajerial pada konsistensi terbuka dalam menyelesaikan biaya.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Mengingat tujuan di atas, eksplorasi ini seharusnya bermanfaat bagi orang lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara spekulatif, kelebihan dari konsentrat dalam makalah ini adalah cenderung menjadi artikel atau referensi tambahan dan data tambahan dan klien tentang ilmu moneter, khususnya akuntansi.

2. Manfaat Praktisi

a. Manfaat Bagi Akademisi

Bagi perorangan standar, pemanfaatan ini dapat memberikan tambahan informasi dan data berharga bagi klien sebagai sumber pandangan untuk tujuan strategis terkait dengan Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kaitannya dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak..

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Untuk spesialis publik, dipercaya dapat memberikan keuntungan bagi UMKM dan dapat memberikan informasi terkait dengan efek pelaksanaan modernisasi rencana hierarkis dan tingkat konsistensi publik dalam biaya klien.

c. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi mahasiswa di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, khususnya mahasiswa di bidang akuntansi, fokus pada program-program yang perlu dipusatkan pada efek penggunaan sistem asosiasi tugas dan tingkat konsistensi lokal dalam biaya penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilina, Ria. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Carolina, I., & Supriyatna, A. (2019). *PENERAPAN METODE EXTREME PROGRAMMING*. Jurnal IKRA-ITH Informatika, 107
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Laporan Tahunan 2007 Tentang Modernisasi Administrasi Perpajakan*.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hama, Aloisius. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce Di Surabaya*. ASCARYA Vol. 1 No. 2: 206-218
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Madewing, Irmayanti. 2013. *Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Hasnudin. Makasar.
- Mianti Y.F., dan Budiwitjaksono G.S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 11 No. 2 : 349-359
- Nasucha, Yakub., Rohmadi, Muhammad, dan Wahyudi, Agus Budi. 2009. *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Media perkasa.
- Nurmantu, Safri dan M. Ramini. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Roscoe. 1982. *Research Methods For Business*. Dalam Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. (hal. 74). Bandung: Alfabeta.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, 1(2), 119-138.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19*. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 63-68.
- Triwigati, L. 2013. *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan*. Universitas Brawijaya, Malang.